

BAB II

KEBIJAKAN INVESTASI ASING PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI TIONGKOK DI INDONESIA

Investasi asing di Indonesia dimulai sejak era kolonial, namun baru berkembang pesat setelah kemerdekaan, terutama sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada periode ini, pemerintah Indonesia membuka pintu bagi investasi asing sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Kebijakan ini dilanjutkan dan diperkuat setelah Reformasi 1998, dengan fokus pada menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui deregulasi dan liberalisasi ekonomi. Sejak era Reformasi, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam kebijakan investasi asing. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia semakin proaktif dalam menarik investasi asing sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Pemerintahan Jokowi memfokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan deregulasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi asing, termasuk dari Tiongkok. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia (Siregar, 2019).

Namun, perubahan ini juga memunculkan berbagai tantangan, baik di tingkat domestik maupun internasional, yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri secara aktif mendorong keterlibatan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur melalui inisiatif seperti *Belt and Road Initiative (BRI)*. Tiongkok

menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, terutama dalam sektor infrastruktur, pertambangan, dan energi. Investasi ini didorong oleh kebijakan keterbukaan ekonomi dalam Pemerintahan Jokowi, yang mencakup deregulasi, penyederhanaan izin investasi, dan pembangunan proyek strategis nasional. Pada bab ini sendiri akan dijelaskan bagaimana Investasi Tiongkok di Indonesia dapat meningkat sangat signifikan yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah, khususnya pada era Pemerintah Jokowi Dodo.

2.1 Hubungan Bilateral Tiongkok dan Indonesia

Pada awal abad ke-21, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok mulai berkembang dengan pesat. Setelah pulihnya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1990, interaksi ekonomi semakin intensif, terutama setelah Tiongkok bergabung dengan *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 2001. Bergabungnya Tiongkok dalam WTO menandai langkah besar bagi negara tersebut untuk memperluas jangkauan ekonominya ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia, dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan lokasinya yang strategis di kawasan Asia Tenggara, menjadi tujuan yang menarik bagi investasi asing, terutama dari Tiongkok. Pada tahun 2000-an, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok semakin erat, didukung oleh penandatanganan berbagai perjanjian bilateral. Salah satu yang paling signifikan adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China* yang ditandatangani pada tahun 2002. Perjanjian ini merupakan langkah

awal menuju pembentukan *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* yang berlaku mulai tahun 2010. Melalui perjanjian ini, tarif perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok secara bertahap dikurangi, yang mendorong peningkatan perdagangan dan investasi. Selain itu, pada tahun 2005, Indonesia dan Tiongkok menandatangani perjanjian *Strategic Partnership*, yang menandai komitmen kedua negara untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang, termasuk investasi. Ini menjadi landasan bagi masuknya investasi Tiongkok ke sektor-sektor strategis di Indonesia seperti infrastruktur, energi, dan pertambangan.

Tiongkok sendiri melihat Indonesia sebagai mitra strategis, yang tidak hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena potensi pasar domestik yang besar. Sejarah investasi Tiongkok di Indonesia tidak terlepas dari dinamika kebijakan ekonomi kedua negara. Pada awalnya, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok sempat mengalami pasang surut, terutama setelah peristiwa 1965 yang menyebabkan ketegangan politik antara kedua negara. Namun, sejak pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 1990, kedua negara mulai membuka kembali pintu kerjasama ekonomi. Di Indonesia, sendiri pada era Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi. Pemerintahan Indonesia mulai mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka terhadap investasi asing untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca krisis 1997-1998. Salah satu langkah penting adalah deregulasi di berbagai sektor, yang mempermudah masuknya investasi asing, termasuk dari Tiongkok.

Seiring berjalannya waktu, Tiongkok semakin memperkuat posisinya sebagai investor utama di Indonesia. Kebijakan investasi Tiongkok di Indonesia semakin mendapatkan dorongan signifikan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjabat sejak tahun 2014. Tiongkok menjadi salah satu mitra utama dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu proyek besar yang didanai oleh Tiongkok adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang menjadi simbol kemitraan strategis antara kedua negara. Presiden Jokowi menyadari pentingnya investasi asing untuk mendukung ambisi pembangunan infrastruktur dalam negeri. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pro-investasi diadopsi untuk menarik lebih banyak modal asing, termasuk dari Tiongkok.

Keputusan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia juga didorong oleh kebutuhan internal mereka terhadap sumber daya alam. Misalnya, Indonesia adalah salah satu produsen utama batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit, komoditas yang sangat dibutuhkan untuk mendukung industri dan ekonomi Tiongkok yang terus berkembang. Selain itu, dengan populasi yang besar, Indonesia menawarkan pasar yang luas untuk produk-produk Tiongkok, menjadikannya tujuan utama ekspansi bisnis. Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan berbagai regulasi yang memberikan kemudahan bagi investor asing, termasuk dari Tiongkok.

Namun, investasi Tiongkok di Indonesia bukan hanya tentang perdagangan dan sumber daya alam. Ini juga bagian dari strategi global yang lebih luas. Melalui inisiatif Belt and Road, Tiongkok berupaya memperluas pengaruh

ekonominya dengan membangun infrastruktur dan menginvestasikan modal di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pertamina, sebagai perusahaan energi nasional terbesar di Indonesia, telah menjadi mitra strategis bagi berbagai perusahaan internasional, termasuk dari Tiongkok. Investasi Tiongkok di Pertamina mencakup berbagai proyek penting yang telah berdampak signifikan terhadap sektor energi di Indonesia, terutama dalam hal modernisasi infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan energi terbarukan. Salah satu area utama dari investasi Tiongkok di Pertamina adalah dalam pengembangan kilang minyak. Misalnya, proyek pengembangan Kilang Balikpapan yang merupakan salah satu kilang terbesar di Indonesia, mendapatkan dukungan finansial dan teknologi dari China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah menjadi produk olahan berkualitas tinggi, yang sangat dibutuhkan oleh pasar domestik dan internasional. Melalui kerjasama ini, Pertamina diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya serta mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (Pertamina, 2022).

Selain pengembangan kilang minyak, Tiongkok juga berperan dalam proyek gas dan energi terbarukan di bawah kemitraan strategis dengan Pertamina. Investasi ini mencakup pengembangan lapangan gas dan infrastruktur LNG (Liquefied Natural Gas), yang penting untuk memenuhi kebutuhan energi domestik yang terus meningkat. Misalnya, proyek Tangguh LNG yang berada di Papua, sebagian didanai oleh Tiongkok, memainkan peran penting dalam

meningkatkan pasokan gas alam domestik serta ekspor LNG ke pasar internasional (Pertamina, 2022). Kerjasama dengan Tiongkok tidak hanya terbatas pada investasi modal, tetapi juga melibatkan transfer teknologi yang signifikan. Teknologi yang diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok telah membantu Pertamina dalam modernisasi proses produksi dan distribusi energi. Ini termasuk penerapan teknologi eksplorasi dan produksi yang lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing Pertamina di pasar energi global (Wang & Liu, 2021).

Investasi ini juga sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Tiongkok telah menunjukkan minat dalam pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin di Indonesia, sebagai bagian dari komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Proyek-proyek ini tidak hanya akan membantu Indonesia mencapai target energi terbarukan tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok di sektor energi (Harsono, 2021).

2.2. Perbandingan Kebijakan Investasi Asing pada era Orde lama,baru, dan Reformasi

Tabel 1.1 Perbandingan Kebijakan Investasi dalam berbagai era

Era	Fokus Utama	Kebijakan Utama	Dampak terhadap Investasi Asing
Orde Baru (1966-1998)	Proteksi dan Sentralisasi	UU PMA No. 1 Tahun 1967, Proteksi BUMN	Investasi asing terbatas di sektor strategis
Reformasi	Deregulasi	UU PMA No.	Liberalisasi lebih luas, tetapi

(1998-2014)	Bertahap	25 Tahun 2007	masih ada proteksi di sektor tertentu
Joko Widodo (2014-sekarang)	Liberalisasi dan Pembangunan Infrastruktur	Deregulasi, Insentif Pajak, OSS	Peningkatan besar dalam investasi asing, terutama dari Tiongkok di sektor infrastruktur

Sumber: Chandra, A. (2017). *"The Evolution of China-Indonesia Economic*

Relations: From Suharto to Jokowi." Journal of Southeast Asian Studies, 15(2), 85-102.

2.3 Kebijakan Investasi Asing Pemerintah Jokowi

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, terdapat beberapa kebijakan spesifik yang dirancang untuk memfasilitasi masuknya investasi asing, terutama dari Tiongkok. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan sejak 2015, yang bertujuan untuk mengurangi hambatan investasi melalui deregulasi, penyederhanaan prosedur perizinan, dan peningkatan iklim bisnis. Di sektor infrastruktur, pemerintahan Jokowi meluncurkan proyek-proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, yang sebagian besar didanai oleh investasi Tiongkok. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Namun, kebijakan ini juga memicu perdebatan tentang kedaulatan ekonomi dan dampak sosial dari proyek-proyek tersebut. Kebijakan Investasi Asing pada era Pemerintahan Jokowi.

Dalam kebijakan pembangunan ekonomi di masa Presiden Joko Widodo, sektor investasi, khususnya investasi asing, menjadi salah satu pilar utama untuk memajukan ekonomi Indonesia. Untuk mendukung hal ini, reformasi hukum

dilakukan dengan meluncurkan dua Paket Kebijakan Hukum (PKH), yakni PKH Jilid I dan PKH Jilid II, serta Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dari PKE I hingga PKE XVI. Reformasi ini menghasilkan sejumlah besar regulasi, termasuk lebih dari 347 Peraturan Pemerintah (PP), 533 Peraturan Presiden (Perpres), dan ratusan peraturan lainnya di bawahnya, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, serta Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal. Selain itu, pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi juga memperkenalkan Omnibus Law melalui Undang-undang Cipta Kerja, yang mengamandemen 79 undang-undang yang ada untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia (Nandang, 2020).

Seperti yang kita ketahui Bersama bahwa Peningkatan Infrastruktur sebagai Prioritas Utama dalam Investasi asing ini. Salah satu kebijakan utama pemerintahan Jokowi adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung ambisi ini, pemerintah memperkenalkan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mencakup ratusan proyek infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api. Yang bisa dilihat dalam Proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), yang dimana Proyek ini bergerak dalam kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah dijelaskan sebelumnya yang dimana proyek ini adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar yang dibiayai oleh Tiongkok di bawah pemerintahan Jokowi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2020). Yang kedua ada Penyederhanaan Birokrasi dan Regulasi yang dimana Pemerintah Jokowi memperkenalkan berbagai langkah untuk menyederhanakan proses perizinan bagi investor asing. Salah satu inisiatif

utama adalah peluncuran *Online Single Submission (OSS)* pada tahun 2018, sebuah sistem perizinan terintegrasi yang memungkinkan pengusaha untuk mengurus semua izin usaha secara online. OSS dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses investasi, yang sebelumnya terkenal lambat dan birokratis (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 2018).

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan Omnibus Law pada tahun 2020, yang bertujuan untuk memangkas regulasi yang tumpang tindih dan menghambat investasi. Omnibus Law mengamandemen banyak undang-undang yang dianggap menghambat masuknya investasi asing, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi dalam periode kedua kepemimpinannya, yaitu menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dengan tujuan meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan menghilangkan birokrasi yang rumit serta praktik pungli. Pada dasarnya, reformasi hukum ini bertujuan untuk menghapus atau setidaknya mengurangi hambatan terhadap masuknya investasi asing, melalui upaya deregulasi dan debirokratisasi. Ini dilakukan dengan menyederhanakan proses perizinan serta memberikan berbagai insentif, termasuk insentif perpajakan. Dengan demikian, reformasi hukum diarahkan untuk menciptakan sistem hukum investasi yang lebih liberal. Dari perspektif teoritis, reformasi hukum yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi juga dapat dipahami karena hukum merupakan faktor eksternal yang

menentukan apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh investor asing (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

Untuk menarik lebih banyak investasi asing, pemerintah Jokowi menawarkan berbagai insentif fiskal, termasuk *tax holiday* (pembebasan pajak sementara) dan *tax allowance* (pengurangan pajak). Insentif ini diberikan kepada perusahaan asing yang berinvestasi dalam sektor-sektor yang dianggap strategis oleh pemerintah, seperti manufaktur, energi, dan infrastruktur (Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia 2020). Selain itu Di bawah kepemimpinan Jokowi, lebih banyak sektor ekonomi Indonesia dibuka untuk investasi asing. Pemerintah melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI), yang membatasi kepemilikan asing dalam industri tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi asing di sektor-sektor yang sebelumnya dibatasi, seperti transportasi, pariwisata, dan pendidikan. Jokowi juga menekankan pentingnya kemitraan dengan negara-negara lain untuk meningkatkan investasi asing. Selain kerjasama dengan Tiongkok melalui BRI, Indonesia juga memperkuat hubungan dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Kerjasama ini seringkali melibatkan proyek-proyek besar yang didukung oleh modal asing dan teknologi dari negara-negara tersebut.

2.3.1 Kebijakan Investasi Asing Negara Lain

Untuk memberikan Pemahaman serta konteks yang lebih luas, disini akan membandingkan kebijakan investasi asing Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Malaysia, terlihat bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah agresif untuk menarik investasi asing, terutama

sejak pemerintahan Joko Widodo. Salah satu contoh adalah implementasi dari berbagai paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memudahkan investasi asing melalui penyederhanaan perizinan dan penghapusan regulasi yang dianggap menghambat. Di sisi lain, Vietnam telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam menarik investasi asing, terutama dari perusahaan multinasional yang ingin memindahkan pabrik mereka dari Tiongkok. Keberhasilan Vietnam ini sebagian besar didorong oleh biaya tenaga kerja yang lebih rendah, insentif pajak yang menarik, dan perjanjian perdagangan bebas yang agresif. Berbeda dengan Indonesia, yang cenderung lebih terfokus pada proyek-proyek infrastruktur besar, Vietnam lebih menekankan pada pengembangan kawasan industri dan integrasi global melalui perdagangan bebas (Nguyen, 2020).

Malaysia, di sisi lain, juga berhasil menarik investasi asing, terutama di sektor teknologi dan manufaktur. Pemerintah Malaysia telah menciptakan lingkungan investasi yang stabil dengan insentif pajak yang kompetitif dan kebijakan pro-bisnis. Salah satu kekuatan utama Malaysia adalah kebijakan yang lebih konsisten dan prediktif dibandingkan dengan Indonesia, yang kadang-kadang dipandang kurang stabil oleh investor asing. Selain itu, Malaysia telah berhasil memanfaatkan hubungannya dengan negara-negara maju untuk menarik investasi di sektor berteknologi tinggi, sementara Indonesia masih berfokus pada sektor sumber daya alam (Mahathir, 2019). Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam hal jumlah penduduk dan sumber daya alam, tantangan yang dihadapinya adalah menciptakan kebijakan yang lebih ramah terhadap investor, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia, Indonesia perlu memperkuat reformasi struktural untuk dapat bersaing lebih efektif dalam menarik investasi asing (Siregar, 2019).

2.3.2 Keberhasilan Kebijakan Investasi Indonesia ke Tiongkok

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* atau *FDI*) dari Tiongkok ke Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2020, Tiongkok menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, dengan realisasi investasi mencapai USD 4,8 miliar (Badan Koordinasi Penanaman Modal 2021). Investasi ini sebagian besar diarahkan ke sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur, yang merupakan sektor-sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Investasi dari Tiongkok memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu contoh penting adalah investasi di sektor infrastruktur, khususnya dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan efisiensi transportasi . Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa, sehingga menurunkan biaya logistik dan mendorong peningkatan daya saing industri lokal. Selain infrastruktur, investasi Tiongkok dalam sektor energi, seperti pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga air, juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Suwandi, A. 2020).

Salah satu contoh investasi besar di sektor ini adalah pengembangan kawasan industri pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah, yang difokuskan pada

pengolahan nikel menjadi produk bernilai tinggi seperti stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Proyek ini melibatkan perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan Holding Group dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Tsingshan Holding Group. 2021). Pertamina, sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara, telah menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan energi Tiongkok, seperti China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), untuk mengembangkan ladang minyak dan gas di Indonesia (Pertamina. 2022). Selain energi fosil, Tiongkok juga mulai berinvestasi dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga angin. Investasi ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mencapai target pembangunan berkelanjutan (Harsono, A. 2021).

Yang terakhir dengan adanya Investasi Tiongkok di sektor teknologi dan telekomunikasi di dalam Perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei dan ZTE telah berinvestasi di Indonesia untuk membantu membangun jaringan telekomunikasi 5G dan infrastruktur digital lainnya. Dengan investasi ini, Indonesia dapat mempercepat transformasi digitalnya, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di era digital saat ini.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang didukung oleh investasi Tiongkok juga memungkinkan integrasi teknologi di berbagai sektor lainnya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia (Huawei

Indonesia, 2022). Proyek-proyek ini tidak hanya menambah kapasitas energi nasional tetapi juga mendukung industrialisasi dan urbanisasi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia (Tan, K. 2021). Sebagai negara berkembang yang terus memperbaiki infrastruktur dasar dan kapasitas energi, investasi dari Tiongkok menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, investasi Tiongkok juga berperan penting. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa setiap peningkatan investasi asing sebesar 1% dapat meningkatkan lapangan kerja sekitar 0,5% di sektor-sektor yang menerima investasi tersebut (Bank Indonesia 2020).

Sektor manufaktur juga menjadi salah satu prioritas investasi Tiongkok di Indonesia, terutama di bidang elektronik, tekstil, dan otomotif. Banyak perusahaan manufaktur Tiongkok yang mendirikan pabrik di Indonesia untuk memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah dan akses ke pasar ASEAN. Dengan adanya investasi ini, sektor manufaktur Indonesia mendapat dorongan yang signifikan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor barang-barang manufaktur, yang dimana investasi Tiongkok di sektor manufaktur juga mendorong transfer teknologi ke Indonesia, yang membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi dalam negeri.

Dengan tingginya aliran investasi dari Tiongkok, terutama di sektor manufaktur, banyak tenaga kerja lokal yang mendapatkan manfaat dari peluang kerja baru yang tercipta. Secara keseluruhan, investasi asing dari Tiongkok memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi ini

telah mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan kapasitas energi, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan PDB. Namun, pemerintah Indonesia perlu terus memantau dan mengelola investasi ini agar memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi nasional dan menghindari potensi dampak negative (Haris, F., & Purnomo, H. 2022).